



► PPDB 2022

Zonasi Dibikin demi Pemerataan Pendidikan

*Yosef Leon, Ujang Hasanudin, Anisatul Umah
redaksi@harianjogja.com*

JOGJA—Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) di kabupaten/kota di DIY membuat sejumlah kebijakan untuk pemerataan kualitas pendidikan di setiap sekolah, salah satunya dengan sistem zonasi.

Di Kota Jogja, Disdikpora berupaya menambah kuota zonasi wilayah di sisi selatan guna pemerataan peserta didik dan mengoptimalkan sebaran murid agar lebih berimbang di seluruh SMPN di Kota Jogja.

Zonasi Dibikin...

Hal ini dilakukan lantaran jumlah sekolah yang masih timpang antara sisi selatan dan utara untuk jenjang SMPN di Kota Jogja. "Untuk zonasi wilayah 15 persen itu total se-Kota Jogja. Kita berupaya yang wilayah Jogja selatan kami tambah kursinya. Kuotanya diperbanyak di selatan dan di utara lebih kecil. Mudah-mudahan dengan metode seperti ini jarak paling jauh yang diterima antara utara dan selatan tidak terlalu jauh," kata Kepala Disdikpora Jogja, Budi Asrori, Rabu (15/6).

Menurut Budi, penambahan kuota di Jogja bagian selatan itu untuk merespons permasalahan akses PPDB zonasi wilayah. Pasalnya sebaran jumlah SMPN di Jogja selatan hanya ada sebanyak lima sekolah sementara Jogja utara ada sekitar 11 SMPN. Namun begitu pihaknya menegaskan bahwa calon murid tetap bisa mendaftar di sekolah sisi utara lewat zonasi mutu. "Secara prinsip antara selatan dan utara tidak ada bedanya karena calon peserta didik juga bisa mendaftar sekolah di Jogja bagian utara dengan jalur zonasi mutu," jelasnya.

Penilik Madya Disdikpora Kota Jogja, Rochmat menyebut, pihaknya telah berupaya menambah kuota murid di wilayah selatan seperti SMPN 9 atau SMPN 10. Di sisi lain, pengertian kuota 15% untuk zonasi wilayah juga tidak diterapkan secara otomatis 15% di setiap sekolah, tetapi dibagi merata untuk seluruh SMPN di Jogja.

Menurut Rochmat, kebijakan untuk menambah SMPN baru di wilayah selatan tentunya belum memungkinkan jika dilakukan pada saat ini. Selain membutuhkan perencanaan yang matang, pembangunan SMPN baru

juga membutuhkan waktu yang cukup lama.

Di Sleman, Dinas Pendidikan memberikan pelatihan kepada guru setiap tahunnya dalam rangka pemerataan pendidikan. Sekretaris Dinas Pendidikan Sleman, Sri Adi Marsanto mengatakan pelatihan ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Meski demikian pelatihan belum menjangkau semuanya karena keterbatasan anggaran. Selain dari APBD, menurutnya ada juga anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kemdikbud Ristek yang juga mengadakan pelatihan.

"Peningkatan kualitas, kapabilitas dari seorang guru setiap tahun kita ada bimtek pelatihan segala macam," ujarnya.

Berkaitan dengan PPDB untuk pemerataan kualitas pendidikan sudah menggunakan sistem zonasi. Sehingga siswa tidak terus berlomba mendapatkan sekolah favorit. Siswa diharapkan bisa memilih sekolah yang terdekat, sehingga bibit-bibit unggul bisa menyebar ke semua sekolah. Dia menegaskan, zonasi ini tujuannya adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan. "Sekarang sudah banyak sekolah yang nilainya bagus-bagus tidak hanya SMPN 4 Pakem saja," ucapnya.

Kepala SMPN 3 Prambanan, Nurani, mengatakan untuk pemerataan pendidikan sudah cukup baik dengan adanya zonasi. Namun, masih banyak sekolah negeri yang kekurangan guru PNS. "Sehingga harus mengangkat guru honorer sesuai kemampuan sekolah."

Meski demikian pihak sekolah akan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan

mengikutkan guru pada kegiatan *workshop* terkait pembelajaran. *In house training* (IHT) juga diadakan terkait dengan metode dan pembelajaran.

Kepala Disdikpora Bantul, Isdarmoko, mengatakan sebenarnya jalur zonasi di PPDB dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan. "Jadi siswa-siswa yang inputnya bagus atau nilai rapor dan nilai Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah [ASPD] tinggi-tinggi bisa merata di semua sekolah. Jangan sampai ada di sekolah tertentu saja, maka PPDB dengan zonasi," kata Isdarmoko.

Selanjutnya setelah adanya pemerataan siswa, kata Isdarmoko, akan dilakukan pemerataan gurunya. Guru-guru yang potensial dan memiliki prestasi tinggi nantinya akan di sejumlah sekolah sehingga tidak menumpuk di sekolah tertentu seperti yang terjadi saat ini. Namun untuk pemerataan guru diakui Isdarmoko tidak mudah, sehingga belum diterapkan tahun ini.

Zona 300 Meter

Ratusan pendaftar PPDB SMA/SMK di DIY ditolak saat mendaftar di jalur zona 300 meter dengan beragam alasan. Disdikpora DIY memastikan jalur 300 meter ini tidak menghabiskan kuota zonasi karena pendaftar sedikit.

Hingga Rabu(15/6) tercatat pendaftar jalur ini sebanyak 591 seluruh SMA/SMK di DIY. Dari jumlah itu sebanyak 258 ditolak, diterima 185 siswa, dan 148 berkas dalam proses verifikasi lapangan.

Kepala Disdikpora DIY Didik Wardaya mengatakan jalur zonasi dengan kuota paling tinggi merupakan upaya pemerintah untuk pemerataan pendidikan.

(Sunartono)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005